

**KONTEKSTUALISASI DAN IMPLEMENTASI
WELTANSCHAUUNG PANCASILA
DALAM PENDIDIKAN¹**

oleh Sofian Effendi²

Amanat untuk Universitas Perjuangan³

Saya amat senang dan merasa amat terhormat mendapat undangan dari Fakultas Filsafat untuk ikut menjadi pembicara pada Seminar Nasional dengan tema “Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” dalam rangka mengenang satu abad kelahiran Profesor Notonagoro. Seminar ini saya pandang merupakan momen yang amat tepat untuk kembali mengingatkan dan menggugah warga Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada dibentuk oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tanggal 16 Desember 1949. Tetapi tanggal kelahiran UGM yang dirayakan oleh warganya setiap tahun adalah 19 Desember. Penetapan hari kelahiran UGM yang agak “menyimpang” dari kelaziman ini karena Presiden Soekarno ingin menjadikan kelahiran Universitas Gadjah Mada sebagai 2 *milestone* sejarah bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, “... tanggal 19 Desember 1949 dipilih sebagai hari kelahiran Universitas Negeri Gadjah Mada untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Meskipun diserang oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, dalam waktu satu tahun bangsa Indonesia telah mampu bangkit kembali. Kebangkitan bangsa Indonesia kita tunjukkan dengan mendirikan sebuah universitas karena kekuatan suatu bangsa amat ditentukan oleh kemampuan lembaga pendidikan tinggi dalam mencerdaskan bunga-bunga bangsa dan sekaligus sebagai sumber inspirasi bagi rakyat ...”.

¹ Disampaikan sebagai orasi ilmiah pada puncak peringatan Dies Natalis ke 55 Universitas Gadjah Mada, 20 Desember 2004.

Kedua, melalui pendirian Universitas Gadjah Mada para *founding fathers* ingin menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah memasuki babak baru. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik melalui perjuangan bersenjata dianggap telah selesai. Tahap selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan tersebut dengan perjuangan melawan kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan melalui tindakan yang dijiwai oleh asas keimanan, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang merupakan suatu totalitas yang terangkum dalam Falsafah Dasar Pancasila.

Dalam pandangan Profesor Notonagoro (dalam Mubyarto, 2004:45), upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah perwujudan dari asas perikemanusiaan yang adil dan beradab, dan bersama semua asas yang terkandung dalam Pancasila merupakan landasan ideologis kegiatan pendidikan, pengajaran dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan bangsa Indonesia. Pandangan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 UU No. 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pada Pasal 7 ayat (1) tentang Penetapan UGM sebagai Badan Hukum Milik Negara ditetapkan bahwa UGM diselenggarakan berdasarkan atas asas keuniversalan dan keobjektifan ilmu pengetahuan dalam mencapai kenyataan dan kebenaran, kebebasan akademik yang dilaksanakan secara bertanggung-jawab, keadaban, kemanfaatan, kebahagiaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan, serta asas kerohanian, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan kemasyarakatan, sebagaimana dicantumkan dalam falsafah dasar negara.

Selama 55 tahun menjalankan misi Tridarmanya, telah banyak prestasi yang diraih oleh Universitas Gadjah Mada dalam mengamalkan asas kerohaniannya tersebut. Berbagai nama dan julukan yang diberikan masyarakat kepada Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Kerakyatan, Universitas Perjuangan dan Universitas Nasional, dapat dipandang sebagai pengakuan atas komitmennya yang kuat pada nilai-nilai dasar tersebut. Seperti disampaikan oleh Profesor Sardjito pada Pidato Dies Natalis VI, Universitas Gadjah Mada telah menetapkan pandangan teleologis bahwa nilai-nilai Pancasila adalah falsafah hidup dan pendirian hidup universitas perjuangan ini. Dengan demikian, dalam melaksanakan kegiatan mengungkapkan kenyataan

dan kebenaran, obyektivitas dan universalitas ilmu pengetahuan, Universitas Gadjah Mada harus selalu berusaha melakukannya selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Yang menjadi pertanyaan saat ini, setelah lebih dari setengah abad menjalankan misi tersebut: (i) Seberapa jauh cita-cita para pendiri Universitas Gadjah Mada tersebut telah berhasil kita laksanakan? (ii) Apakah falsafah hidup atau pandangan hidup Universitas Gadjah Mada tersebut masih tetap relevan untuk mendukung pelaksanaan misi Universitas Gadjah Mada dalam mencerdaskan bunga-bunga bangsa dan sebagai sumber inspirasi bagi rakyat Indonesia? dan (iii) Apakah untuk menghadapi tantangan perubahan global yang terjadi saat ini dan di masa depan, bangsa Indonesia harus meniru apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa maju dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, ibarat usaha fotokopi (*xeroxing*), atau sebaliknya kita harus memiliki keberanian untuk menempuh ‘jalan sendiri’ dengan memperhatikan keadaan dunia dan prediksi tentang masa depan?

Uraian berikut akan menjawab ketiga pertanyaan di atas dengan menyajikan tentang nilai-nilai yang menjadi landasan dan orientasi Universitas Gadjah Mada sejak awal kelahirannya. Sesudah itu, berturut-turut akan disampaikan pembahasan tentang tantangan Universitas Gadjah Mada di era perubahan global, globalisasi dan komodifikasi pengetahuan dan teknologi, revolusi perkembangan teknologi informasi dan munculnya isu atau bahkan mitos kematian universitas (*the end of university*). Akhirnya uraian ini akan ditutup dengan eksplorasi tentang implikasi kebijakan-kebijakan universitas untuk mengukuhkan kembali peran dan fungsinya sebagai sebuah “*culture-conserving*”, “*culture-creating*” dan “*civilizing institution*”.

Pancasila: Pandangan Hidup Universitas Gadjah Mada

Identitas Universitas Gadjah Mada sebagai universitas perjuangan, universitas kerakyatan, universitas Pancasila, dan identitas-identitas yang lain memiliki akarnya dalam sejarah kelahirannya. Universitas Gadjah Mada didirikan sebagai peringatan penyerbuan tentara Belanda ke ibu kota Republik Indonesia. Ia didirikan di masa perjuangan kemerdekaan, seminggu sebelum Belanda menyerah. Ia

didirikan dengan sebuah idealisme. Tak ada studi kelayakan, tak ada modal uang yang cukup untuk lima tahun pertama, juga tak ada fasilitas yang pantas untuk sebuah universitas, dengan jumlah dosen yang tidak mencukupi, sebagian diantaranya adalah pejuang-pejuang dalam revolusi fisik, seperti juga para mahasiswanya. Dosen harus merangkap matakuliah, sementara peralatan dan bahan laboratorium harus diimprovisasi, sebagian bahkan harus diungsikan. Universitas Gadjah Mada didirikan sebagai gabungan beberapa perguruan tinggi swasta dan milik pemerintah. Sesudah Pemerintah Pusat pindah kembali ke Jakarta, pegawai negeri yang tidak ikut dipindahkan ditampung oleh Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas nasional dan oleh pemerintah negara bagian Republik Indonesia.

Dengan demikian, kita lihat bahwa identitas Universitas Gadjah Mada adalah universitas perjuangan nasional melawan kolonialisme, imperialisme dan ketidakadilan sosial yang ditimbulkannya. Seperti tercantum dalam Statuta pertamanya, Universitas Gadjah Mada merupakan alat untuk persatuan nasional, yang juga tercermin dalam masyarakat mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah dan pulau. Sebagai universitas, perjuangan selanjutnya adalah membangun ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kemanusiaan. Universitas adalah tempat bertanya, kreator dan inovator, penyebar dan pengawal kebudayaan, serta pelestari vitalitas bangsa. Di awal perjalanannya waktu itu, mahasiswa belajar dengan bebas, tidak dipungut sumbangan dan menurut temponya masing-masing (*self-paced*).

Nasionalisme Universitas Gadjah Mada terlihat pula pada keengganannya menerima dosen-dosen kolaborator Belanda, dan pada ketetapan hati untuk memilih sistem sendiri dengan tidak mengabaikan asimilasi unsur-unsur dari kebudayaan lain, bahkan sejak awal telah mempekerjakan dosen-dosen asing, yang sedapat-dapatnya memberi kuliah dalam bahasa Indonesia, asal pengajaran mereka tidak bertentangan dengan Pancasila, yang menjadi dasar dan pedoman Universitas Gadjah Mada sejak dari awal sejarahnya. Segala matakuliah seyogyanya dikembangkan dengan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, baik ekonomi, kedokteran, pedagogi, dan lain-lain. Tidak ada matakuliah Pancasila bagi semua fakultas, tetapi semua disiplin diresapi dan dibimbing oleh Pancasila.

Promosi doktoral maupun honoris causa membayangkan

integrativitas dan multidisiplinaritas Universitas Gadjah Mada, misalnya tentang agama dan kedokteran, teknik dan kebudayaan, dan lain-lain. Disamping obyektivitas atau inter-subjektivitas ilmiah, Universitas Gadjah Mada memperlihatkan ciri keberpihakan pada yang lemah dalam perkembangan ilmu terapan serta tidak berorientasi pada uang.

Dengan singkat dapat disimpulkan bahwa Universitas Gadjah Mada mengesankan identitasnya dengan:

1. Dasar Pancasila yang meresap dalam setiap disiplin dan sikapnya.
2. Dalam mencipta, mengembangkan, menerapkan dan menyebarkan ilmu dan kebudayaan, Universitas Gadjah Mada:
 - a. memelihara keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan internasional;
 - b. produknya mencerminkan kebudayaan Indonesia;
 - c. memperhatikan kenyataan, kebenaran, keindahan dan kemanusiaan sebagai dasar kebudayaan;
 - d. bersikap flexibel, banyak akal (*resourceful*), improvisatoris, *versatile*, dan berwawasan luas;
 - e. berinisiatif sendiri untuk berbakti bagi kesejahteraan dan perdamaian dunia;
 - f. mempunyai percaya diri yang besar.
3. Demokrasi pendidikan, sehingga pemuda-pemuda yang intelegensinya mampu harus dapat mengecap pendidikan tinggi.
4. Menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan untuk mencapai kemakmuran.
5. Lulusan Universitas Gadjah Mada harus merasa berkewajiban menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
6. Lulusan harus dapat menghargai pahlawan-pahlawan ilmu dan budaya.

Dalam perjalanan sejarah Universitas Gadjah Mada sampai sekarang, memang ada ciri-ciri khasnya yang aus dan terkikis, terlupakan, belum terlaksanakan atau terdesak oleh gejolak-gejolak perubahan nasional dan global, baik politis, ekonomis, sosial dan teknologis. Sekarang ciri-ciri itu harus dibangkitkan kembali. Ciri-ciri identitas tersebut tentu harus disesuaikan dan diselaraskan dengan perkembangan zaman, oleh karena banyak peristiwa telah terjadi dalam bidang demografi, ekologi, geo-politik, dan geo-ekonomi, intensitas interaksi antara bangsa, dan dominasi aliran politik ekonomi

tertentu, perkembangan ilmu dan teknologi, serta tentu saja semangat zaman.

Generasi pengasuh Universitas Gadjah Mada selanjutnya telah berusaha melahirkan pikiran-pikiran baru atau yang diderivasi dari pikiran-pikiran yang mendasari kelahirannya, dalam menghadapi berbagai perubahan mencoba menjadi pengawal (*gatekeepers*) kebudayaan bangsanya dengan keberhasilan yang bervariasi. Usaha memelihara identitas Universitas Gadjah Mada akan dilakukan terus menerus sebagai kewajiban warisan yang tak ada ujungnya. Beruntung, semua itu dapat dilakukan oleh karena Universitas Gadjah Mada berada di kota kebudayaan Yogyakarta, sehingga relatif lebih mudah menghadapi gelombang-gelombang baru yang menghanyutkan segalanya ke arah pos-industrialisme dan pos-modernisme, bahkan pos-strukturalisme serta hegemoni tunggal suatu bangsa.

Universitas Gadjah Mada di tengah perubahan global

Semua itu menunjukkan bahwa sejak awal para pendiri Universitas Gadjah Mada dengan tegas meletakkan landasan idiil dan filosofis pembangunan dan pengembangan identitas dan jati diri Universitas ini dalam konteks kesinambungan dan keberlanjutan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam Pidato Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa kepada Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 19 Desember 1956, misalnya, Prof. Sardjito menyatakan bahwa seperti halnya dengan misi perjuangan Ki Hadjar Dewantara, maka misi perjuangan Universitas Gadjah Mada meliputi tiga kawasan perjuangan berikut: perjuangan kemerdekaan nasional, perjuangan pendidikan, dan perjuangan kebudayaan. Di bawah tekanan penetrasi ekspansi globalisasi kapitalisme neo-liberal yang sangat dahsyat saat ini, saya berpendapat bahwa tri-tunggal misi perjuangan Universitas Gadjah Mada tersebut bukan hanya masih sangat relevan akan tetapi bahkan harus semakin kita pahami sebagai sebuah imperatif. Melalui peran dan fungsinya sebagai “*culture-conserving*”, “*culture-creating*” dan “*civilizing institution*”, yang hak hidupnya bersumber dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia (Sardjito, 1960), Universitas Gadjah Mada harus semakin bersungguh-sungguh berupaya untuk mewujudkan komitmen perjuangannya membebaskan bangsa dan negara Republik Indonesia dari segala bentuk penindasan,

ketidakadilan, dan dehumanisasi. Tentu saja dengan sebuah catatan bahwa pengungkapannya harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan dinamika perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Semua itu juga membuktikan bahwa sejak awal para pendiri Universitas Gadjah Mada telah memiliki pemahaman yang melampaui dasar-dasar pemikiran dari ideologi-ideologi pendidikan yang dikenal di dunia saat ini. *Pertama*, meskipun mereka percaya dan menerima nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kita, namun mereka tidak terpelempang ke dalam paham *fundamentalisme pendidikan* yang menolak pertimbangan-pertimbangan filosofis dan/atau intelektual. Sebaliknya mereka menerima tanpa daya kritik konsep-konsep “kebenaran” yang diwahyukan atau konsensus sosial dari masa lalu yang sudah mapan, serta menganggap bahwa tujuan pendidikan tidak lebih dari pelestarian dan keberlanjutan pola-pola sosial dan tradisi-tradisi masa lalu (baca: O’niel, 1981 dan 2001; baca juga Nelson, Carlson dan Palonsky, 1996). Prof. Sardjito (1956) dengan tegas mengungkapkan hal itu ketika dalam pidato di Universitas Gadjah Mada yang ke 7, sekali lagi mengutip pemikiran Ki Hadjar Dewantara, ia menyatakan bahwa disamping *pendidikan budi pekerti* yang memang sangat diperlukan untuk meningkatkan keluhuran hidup batin anak atau subyek didik, akan tetapi diperlukan juga *pendidikan fikiran* untuk meningkatkan kecerdasan fikiran yang harus dibangun setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya dan selebar-lebarnya bagi pembangunan peri-kehidupan lahir dan batin anak atau subyek didik dengan sebaik-baiknya.

Kedua, mendahului pandangan John Dewey (Bowles dan Gintis, 1976), seorang tokoh ahli pendidikan liberal terkemuka, yang baru pada pertengahan dasawarsa 1960-an menyatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan untuk mewujudkan fungsi “integratif” untuk mengintegrasikan anak atau subyek didik ke dalam berbagai peran kewarganegaraan, fungsi “*egalitarian*” untuk memberikan kepada semua warganegara kesempatan memperoleh pendidikan, dan fungsi “*developmental*” bagi perkembangan psikis dan moral anak atau subyek didik untuk melakukan tanggapan yang seimbang terhadap nilai-nilai kehidupan kuantitatif dan kualitatif, sebaliknya sudah sejak dasawarsa 1940-an para pendiri Universitas Gadjah Mada menyatakan

bahwa tujuan pendidikan di Indonesia harus diorientasikan untuk mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, internasionalisme atau kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.

Ketiga, lebih dari semua itu, mendahului pemikiran para ahli pendidikan kritis yang dengan keras mengkritik sistem pendidikan kapitalis, para pendiri Universitas Gadjah Mada juga sudah sejak sangat dini mengingatkan kita akan bahaya masuknya sistem pendidikan kapitalis di dalam skalanya yang eksekutif di masa depan. Jikalau baru pada akhir dasawarsa 1970-an tokoh-tokoh pendidikan kritis seperti Juergen Habermas (1972), Paulo Freire (1972), dan Samuel Bowles dan Herbert Gintis (1976) menyatakan kritik-kritik mereka terhadap sistem pendidikan kapitalis, maka sudah sejak awal kelahiran Universitas Gadjah Mada pada akhir dasawarsa 1940-an para pendiri universitas ini telah mengingatkan kita akan hadirnya ancaman bahaya semakin menguatnya perkembangan pendidikan kapitalis di Indonesia di era globalisasi. Dalam *Pidato Peringatan Hari Pendidikan Nasional* di Taman Siswa pada tahun 1969, Prof. Sardjito dengan tegas menyatakan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia jikalau kita benar-benar tidak menghendaki masuknya nilai-nilai ekonomi kapitalis di dalam bentuknya yang tidak kita kehendaki ke dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Melalui pernyataannya itu ia memperingatkan kita bahwa:

“..... bila Taman Siswa membuka Fakultas Ekonomi, sejogjanja Madjelis Luhur Taman Siswa, mengadjukan pertanjaan kepada dosen-dosennja, bagaimana mengetrapkan Pantjasila dimata-peladjaran Ekonomi. Bila pertanjaan ini tidak diindahkan, mungkin dapat kedjadian kapitalistik ekonomi masuk di Taman Siswa”.

Lima tahun sebelum itu, dalam sebuah wawancara dengan Majalah Intisari, secara sangat eksplisit beliau bahkan sudah mengingatkan bahwa di dalam bentuknya yang masih sangat awal kala itu, kehadiran sistem kapitalisme di Indonesia ternyata sudah cukup memprihatinkan, ketika beliau menyatakan bahwa:

“Jang merusak keadaan sekarang ini adalah manusia-manusia Indonesia jang berego kera. Mereka banjak bitjara sadja, pandai mengandjurkan ini-itu, akan tetapi tindakannja matjam tindakan kera, jakni mau mengambil terus-menerus, “srakah”, kata orang Djawa”.

Enam Pertanyaan Tentang Jati Diri UGM

Di hadapan perubahan-perubahan global yang sangat dahsyat di bawah tekanan globalisasi neo-liberal saat ini dan di masa depan, beberapa pertanyaan sangat mendasar berikut tentang peluang aktualisasi identitas, jati diri dan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kelahiran Universitas Gadjah Mada perlu memperoleh perhatian yang seksama. *Pertama*, bagaimana pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilai tersebut kini dan di masa yang akan datang harus diwujudkan dan diaktualisasikan ke dalam praksis penyelenggaraan pendidikan di Universitas Gadjah Mada, ketika ekspansi globalisasi kapitalisme neo-liberal telah dan akan semakin berkembang di dalam dinamika dan karakternya yang sangat berbeda dari dinamika dan karakternya ketika pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilai tersebut pertama kali dirumuskan? *Kedua*, benarkah globalisasi kapitalisme yang oleh Robertson (2003) disebut sebagai globalisasi gelombang ketiga itu menawarkan peluang yang lebih menjanjikan bagi Universitas Gadjah Mada untuk mewujudkan dan mengaktualisasikan pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilainya di masa depan, sebagaimana yang mungkin diyakini oleh banyak ahli ekonomi? *Ketiga*, sejauh mana pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilai yang telah dirumuskan dan menjadi obsesi para “*founding fathers*” universitas ini telah dengan jelas diakomodasi di dalam perumusan visi dan misi Universitas Gadjah Mada saat ini? *Keempat*, sejauh mana visi dan misi tersebut telah menjadi pemahaman dan obsesi seluruh civitas akademika universitas di dalam kaitannya dengan tantangan perubahan global yang tengah kita hadapi saat ini? *Kelima*, apakah struktur dan mekanisme kelembagaan universitas kita telah memiliki kapasitas yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskannya? *Keenam*, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, kebijakan-kebijakan universitas apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas itu?

Untuk menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua, kita perlu memahami dengan lebih seksama tantangan perubahan global yang tengah kita hadapi saat ini, dan yang membedakannya dari tantangan yang dihadapi oleh Universitas Gadjah Mada pada awal kelahirannya. Pertama, isu sangat penting yang harus kita pahami adalah bahwa pilihan identitas, jati diri dan nilai-nilai yang dirumuskan oleh para pendiri Universitas Gadjah Mada waktu itu dilakukan di hadapan tantangan hadirnya ancaman kapitalisme dunia dari era yang oleh Robertson (2003) disebut sebagai era globalisasi gelombang pertama dan kedua, dan oleh Gelinias (2003) disebut sebagai era merkantilisme dan era ekspansi kapitalisme kolonial, yang memiliki karakter dan dinamika yang sangat berbeda dari karakter dan dinamika globalisasi yang kita hadapi saat ini dan di masa depan.

Kedua, pada saat yang sama, kita perlu melakukan penilaian kritis dan lebih jernih tentang implikasi ekspansi globalisasi gelombang ketiga bagi negara-negara di Dunia Ketiga, terutama implikasinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan universitas di negara-negara tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, logika yang mendasari ekspansi globalisasi gelombang ketiga diturunkan dari ideologi neo-liberalisme, yang di dalam filsafat politik kontemporer memiliki afinitasnya dengan ideologi libertarianisme yang direntang melampaui batasnya yang ekstrim. Seperti halnya dengan libertarianisme yang membela kebebasan pasar dan menuntut peran negara yang terbatas (Kymlycka, 1999: 95), neo-liberalisme percaya pada pentingnya institusi kepemilikan privat dan efek distributif dari ekspropriasi kemakmuran yang tidak terbatas oleh korporasi-korporasi transnasional, pada superioritas hukum pasar sebagai mekanisme distribusi sumber daya, kekayaan dan pendapatan yang paling efektif, dan pada keunggulan pasar bebas, sebagai mekanisme-mekanisme sangat penting untuk menjamin kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan semua orang dan individu (Gelinias, *op. cit.*, 2003: 24).

Bekerja melalui regulasi yang dilakukan oleh tiga lembaga multilateral yang oleh Richard Peet (2003) disebut sebagai *The Unholy Trinity* (IMF, Bank Dunia, dan WTO), di bawah tekanan ekspansi globalisasi gelombang ketiga, perlahan-lahan akan tetapi pasti, segala sesuatu yang berharga tidak dapat dipertahankan dari

komodifikasi dan komersialisasi sistem ekonomi global: termasuk air, bahan pangan, kesehatan, karya seni, dan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Semua itu terjadi terutama melalui proses marginalisasi kekuasaan dan otoritas negara-negara Dunia Ketiga di dalam pengaturan ekonomi nasional mereka, yang terjadi dalam lima tahapan perkembangan berikut (Gelinas, *ibid*: 31).

- (1) Deregulasi sistem keuangan internasional Bretton Woods, yang terjadi sejak tahun 1971, dan yang telah mengubah semua aset keuangan dunia ke dalam kapital spekulatif.
- (2) Deregulasi ekonomi Dunia Ketiga secara sistematis dan bertahap, yang terjadi sejak tahun 1980-an melalui program-program penyesuaian struktural (*structural adjustment*) di bawah pengawasan IMF dan Bank Dunia untuk mengintegrasikan negara-negara sedang berkembang ke dalam sistem pasar global.
- (3) Deregulasi *stock markets* yang terjadi sejak tahun 1986 untuk mengatur deregulasi semua *stock markets* di seluruh dunia.
- (4) Deregulasi produksi pertanian dan komersialisasi pelayanan-pelayanan yang timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian internasional.
- (5) Proliferasi kemudahan-kemudahan pajak dan perbankan (*tax and banking havens*) sejak pertengahan tahun 1990-an, yang telah menghasilkan separuh dari seluruh aliran keuangan dunia terjadi melalui kemudahan-kemudahan bebas hambatan dari semua bentuk kendala legal oleh karena kekuasaan publik mengikuti ketidakpedulian kebijakan-kebijakan publik.

Semua itu telah menyebabkan globalisasi neo-liberal secara mendasar memiliki dinamika dan implikasi yang sangat berbeda dari dinamika dan implikasi globalisasi gelombang pertama dan kedua. Jikalau di era globalisasi gelombang pertama dan kedua ekstraksi kekayaan negara-negara sedang berkembang dilakukan dengan menggunakan mekanisme “akumulasi primitif” melalui beragam bentuk kekerasan fisik yang terbuka seperti penaklukan dan kolonisasi, perampokan dan perbudakan, serta eksploitasi pertanian dan perdagangan antar benua, maka di era globalisasi gelombang ketiga ekstraksi kekayaan negara-negara Dunia Ketiga dilakukan dengan cara-cara yang sangat lembut dan tersembunyi melalui regulasi sistem

perdagangan internasional yang di atas permukaan tampak sangat bebas dan demokratis akan tetapi yang di bawah permukaan sesungguhnya seringkali jauh lebih eksploitatif dan tidak adil. Tidak mengherankan oleh karenanya jikalau keberhasilan globalisasi gelombang ketiga yang telah membawa perkembangan peradaban umat manusia ke tingkat yang selama ini tidak pernah terbayangkan, harus berjalan seiring dengan terjadinya berbagai tragedi kemanusiaan di banyak negara sedang berkembang. Gelinas (*ibid*: 165-166) menyebut beberapa tragedi kemanusiaan berikut diantara yang paling penting:

- (1) 4 sampai 6 milyar penduduk berada di 127 negara terbelakang di dalam kondisi kemiskinan yang berat;
- (2) 49 negara paling terbelakang secara teknologis mengalami kebangkrutan;
- (3) pendapatan per kapita per tahun dari 100 negara di Dunia Ketiga mengalami penurunan dari keadaan 10, 15, 20 dan bahkan 30 tahun yang lalu;
- (4) 2,8 milyar penduduk di negara-negara Dunia Ketiga hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS (Amerika Serikat) per hari;
- (5) 1,3 milyar penduduk di negara-negara yang sama bahkan hidup dengan tingkat konsumsi kurang dari 1 dollar AS;
- (6) 2,6 milyar penduduk dunia tidak memiliki infrastruktur sanitasi yang memadai; dan
- (7) 1,4 penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih.

Laporan statistik *UN Human Development Report* tahun 1996 (Tehrani, *op. cit.*, 1999: 157) menguatkan semua itu dengan menunjukkan semakin menguatnya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi dunia melalui penyajian statistik berikut: 20 persen penduduk terkaya di dunia menerima lebih dari 82 persen pendapatan dunia, sementara 20 persen penduduk paling miskin hanya menerima 1,4 persen. Mengutip laporan Rummel tahun 1994, Tehrani menyebutkan pula bahwa sepanjang kurun waktu antara tahun 1900 sampai dengan tahun 1990 telah terjadi sekitar 250 perang antar negara dan perang sipil di berbagai negara yang merenggut kematian lebih dari 100 juta tentara dan 100 juta penduduk sipil. Lebih dari itu, jikalau pada abad ke-18 dan abad ke-19 kematian prajurit yang terjadi dalam peperangan

hanya mencapai angka 50 dan 60 orang per 1 juta penduduk dunia, angka itu meningkat secara sangat dramatik pada abad 20 menjadi 460 kematian per 1 juta penduduk dunia.

Kenyataan-kenyataan itu lah yang antara lain telah menjadi alasan Tehranian (1999: 156) untuk menyebut Abad ke-20 sebagai “abad kematian yang direncanakan” (*a century of death by design*). Memasuki akhir Abad ke-20 sejumlah cendekiawan terkemuka bahkan telah menengarai terjadinya “kematian” banyak hal yang selama ini menjadi fondasi dari tata kehidupan dunia (Tehrani, *op. cit.*, 1996): mulai dari “*the end of ideology*” (Bell, 1960), “*the end of history*” (Fukuyama, 1989), “*the end of modernity*” (Mowlana dan Wilson, 1990), “*the end of journalism*” (Katz, 1992), “*the end of geography*” (Mosco, 1994), “*the end of racism*” (D’Souza, 1995), dan “*the end of work*” (Rifkin, 1995), sampai dengan “*the end of university*” (Tehrani, 1996).

Implementasi Pancasila sebagai Weltanschauung Universitas Gadjah Mada

Upaya kontekstualisasi dan revitalisasi jati diri dan nilai-nilai itu tidak akan banyak maknanya jikalau struktur dan mekanisme kelembagaan Universitas Gadjah Mada tidak memberikan kemungkinan bagi aktualisasi semua itu ke dalam praksis penyelenggaraan universitas. Itulah problematika kelembagaan kontekstualisasi dan revitalisasi identitas, jati diri dan nilai-nilai luhur universitas kita, yang juga perlu dirancang dan dicarikan solusinya. Pelaksanaannya mensyaratkan pentingnya dilakukan penyesuaian-penyesuaian struktural dan mekanisme-mekanisme kelembagaan universitas untuk memberikan jaminan tersedianya ruang kelembagaan yang lebih terbuka bagi aktualisasi identitas, jati diri dan nilai-nilai tersebut. Penyesuaian-penyesuaian struktural dan mekanisme-mekanisme kelembagaan universitas yang dimaksud, di satu sisi harus memberikan otonomi bagi perkembangan program-program dan pusat-pusat studi sebagai ujung tombak pengungkapan fungsi universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi pada saat yang sama juga harus mampu meningkatkan fungsi integratif birokrasi universitas untuk membangun dialog akademik diantara berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan unit-unit kelembagaan yang menge-

lolanya.

Penyesuaian-penyesuaian kelembagaan tersebut bukan hanya sangat diperlukan untuk memberikan ruang kelembagaan universitas yang lebih terbuka bagi aktualisasi identitas, jati diri dan nilai yang menjadi landasan dan orientasi universitas kita, akan tetapi juga memiliki peran yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kontekstualisasi dan revitalisasi identitas, jati diri dan nilai-nilai Universitas Gadjah Mada harus dilakukan: sekali lagi, melalui pendekatan indoktrinasi dan penataran-penataran seperti yang selama ini kita lakukan, atau melalui pengembangan dikursus akademik yang lebih demokratis seperti yang seharusnya dilakukan dalam proses produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan pada umumnya? Jawabnya, menurut hemat saya sangat lah jelas. Tanpa menolak kenyataan bahwa banyak dosen dan mahasiswa tidak lagi memiliki pengetahuan yang jelas mengenai identitas, jati diri dan nilai-nilai yang telah dirumuskan sebagai landasan dan orientasi universitas kita, upaya untuk melakukan kontekstualisasi dan revitalisasi semua itu di masa depan harus tidak lagi dilakukan melalui pendekatan indoktrinasi atau penataran-penataran seperti yang selama ini kita lakukan.

Meskipun harus diakui bahwa sejumlah dosen senior yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan sejarah kelahiran universitas kita memiliki pemahaman yang lebih otentik tentang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan universitas kita, namun mereka tidak seyogyanya diposisikan sebagai ideolog-ideolog yang memiliki hak dan otoritas untuk memberikan indoktrinasi atau penataran-penataran tentang nilai-nilai Pancasila kepada dosen-dosen muda dan para mahasiswa. Sebaliknya, kontekstualisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan idiil dan filosofis universitas kita seyogyanya dilakukan melalui proses akademik untuk menurunkan aktualisasinya ke dalam kategori-kategori epistemologis, aksiologis, dan perspektif teoritis bagi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam proses itu para dosen senior memiliki peran penting untuk memberikan referensi tentang sejarah kelahiran Universitas Gadjah Mada, beserta dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasannya.

Hasil dari keseluruhan proses tersebut akan memberikan input bagi perumusan kebijakan-kebijakan operasional universitas, yang paling sedikit akan mengungkapkan diri dalam beberapa dataran

kebijakan berikut. Pada dataran yang pertama, ia akan mengungkapkan dirinya dalam bentuk kebijakan pengembangan kurikulum, yang di satu sisi kaya dengan muatan nilai-nilai Pancasila, dan pada sisi yang lain memiliki kemampuan untuk mengakomodasi perspektif multidisipliner atau transdisipliner, sehingga setiap mata kuliah dari berbagai program studi akan memiliki kemampuan yang kuat untuk membangun dialog diantara berbagai disiplin ilmu pengetahuan tanpa harus kehilangan fokus perhatiannya pada pengembangan disiplin ilmu pengetahuannya sendiri. Kebijakan yang dimaksud harus secara jelas didesain untuk membongkar dan mengikis monisme atau ketunggalan epistemologis, aksiologis, dan perspektif teoritis yang selama ini sangat menguasai penyelenggaraan hampir semua program studi di Indonesia. Dengan kata lain, yang harus dilakukan adalah suatu kebijakan pengembangan kurikulum bagi berbagai program studi yang membuka lebar-lebar pilihan beragam tradisi atau epistemologis keilmuan beserta implikasi pilihan-pilihan aksiologis dan perspektif teoritis yang menjadi derivasi atau turunan masing-masing.

Pada dataran yang kedua, pendirian pusat studi baru yang secara khusus dirancang untuk mengembangkan tiga fungsi berikut perlu dilakukan untuk memperkuat sekolah pascasarjana yang bertugas menyediakan pendidikan pascasarjana multi-disipliner. Meminjam dan mengikuti anjuran Daly dan Cobb, Jr. (1998), perumusan kebijakan pengembangan suatu program atau pusat studi yang secara khusus dirancang untuk mengemban fungsi-fungsi berikut merupakan langkah sangat strategis lain yang perlu dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada di masa depan. Fungsi pertama yang harus menjadi pusat perhatian program atau pusat studi tersebut menyangkut kajian-kajian kritis tentang eksistensi universitas kita sebagai suatu institusi "*culture-conserving*", "*culture-creating*"; dan "*civilizing institution*"; tentang sejarah kelahirannya dan cara ia mengorganisasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkannya; tentang bagaimana ia membangun hubungannya dengan masyarakat tempat ia menjadi bagiannya; tentang sumbangan yang telah dan akan diberikan bagi perkembangan kemanusiaan; tentang kendala-kendala yang menghalangi kebebasan universitas untuk mengungkapkan fungsinya; dan di atas semua itu, tentang kesahihan asumsi-asumsi yang mendasari

perkembangan berbagai disiplin keilmuan yang dikembangkannya serta bagaimana asumsi-asumsi yang mereka anut berkaitan satu dengan yang lain dan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Fungsi kedua, yang juga sangat penting bagi aktualisasi misi Universitas Gadjah Mada di masa depan, berkaitan dengan kajian-kajian sistematis tentang isu-isu kosmologi. Fokus perhatian yang harus menjadi obyek kajiannya adalah mengungkapkan pemahaman yang utuh dan bulat tentang kosmologi dunia yang dibangun dari beragam informasi yang diperoleh dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkannya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab harus muncul dari upaya-upaya untuk mengkaitkan apa yang diperoleh dari kajian-kajian kemanusiaan dengan apa yang diperoleh dari kajian-kajian ilmu psikologi, kajian-kajian ilmu sosial, dan kajian-kajian ilmu-ilmu alam. Fungsinya yang ketiga, bertalian dengan kajian-kajian yang secara khusus dan sistematis dirancang untuk melakukan analisis tentang beragam bentuk krisis yang terjadi pada tingkat nasional dan global. Berbagai informasi tentang hal itu memang sudah menjadi perhatian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan di Universitas Gadjah Mada, akan tetapi semua itu masih belum terintegrasi dalam suatu institusi yang secara khusus berusaha memperoleh pengetahuan yang utuh dan bulat mengenai seluruh persoalan yang sedang dialami umat manusia, dan bagaimana informasi-informasi tersebut berkaitan satu sama lain.

Program atau pusat studi yang dimaksud, sebagaimana dikemukakan oleh Daly dan Cobb, Jr., jelas tidak hanya menuntut dukungan para peneliti yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis lintas disipliner, akan tetapi lebih dari itu bahkan menuntut kemampuan analisis yang ia sebut "non-disipliner". Meskipun program atau pusat studi itu pada awalnya dibentuk sebagai suatu institusi multidisipliner atau transdisipliner, dalam perkembangan jangka panjang menurut mereka harus didorong untuk semakin berkembang menjadi suatu institusi yang bersifat "non-disipliner". Puluhan program atau pusat kajian seperti itu, demikian menurut Daly dan Cobb, Jr., memang sudah dimiliki oleh banyak universitas, akan tetapi karakternya sebagai suatu lembaga kajian multidisipliner, atau bahkan monodisipliner pada umumnya masih terlalu kuat. Tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh karenanya jikalau kebijakan kelembagaan yang kedua

ini tidak mungkin dapat dikembangkan dengan baik tanpa didukung oleh transformasi kualitas sumber daya professional dan kualitas prima “*governance*” atau “tata pemerintahan” yang mendukungnya.

Kebijakan kelembagaan universitas yang ketiga menyangkut sistem administrasi penyelenggaraan kegiatan perkuliahan yang terintegrasi pada tingkat universitas untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk merencanakan dan mengembangkan kemampuan akademik dan profesional lintas disipliner yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan-perubahan global yang semakin berat di masa depan. Kebijakan yang dimaksud, yang mulai tahun 2005 sudah akan segera dilaksanakan, jelas menuntut sistem manajemen baru dengan dukungan infrastruktur baru yang masih harus terus dikembangkan.

Kebijakan kelembagaan universitas yang keempat menyangkut kebijakan universitas untuk mengambil partisipasi aktif dalam pengembangan arsitektur proses globalisasi yang lebih pluralistik, dan oleh karena itu lebih “*liberating*” dan lebih “*enlightening*”. Secara umum kebijakan yang dimaksud menyangkut strategi untuk secara sadar dan terencana mensubordinasikan logika pasar berdasarkan prinsip efisiensi di bawah nilai-nilai keamanan (*security*), keadilan (*equity*), dan solidaritas (*solidarity*). Dalam ungkapan Karl Polanyi (Bello, 2003: 286), kebijakan tersebut bertalian erat dengan upaya sistematis dan terencana untuk menempatkan sistem ekonomi di bawah kendali sistem sosial masyarakat, dan bukan membiarkan perkembangan masyarakat di bawah kontrol sistem ekonomi.

Dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan yang dimaksud menyangkut pertanyaan tentang apakah produksi dan distribusi pengetahuan akan terus dibiarkan berada di bawah monopoli kepentingan-kepentingan korporasi untuk motif-motif keuntungan melalui regulasi GATT/WTO berdasarkan perjanjian TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*), atau ia harus diserahkan kepada “*domain*” publik dan dipergunakan untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan dan penyakit. Melalui regulasi itu, TRIPs mewajibkan semua anggota WTO untuk memberikan monopoli kepada pemegang hak paten atas penemuan-penemuan mereka—yang pada umumnya berupa korporasi-korporasi raksasa dari negara-negara Utara. Sayangnya, TRIPs dan perjanjian-perjanjian perdagangan

international yang lain menuntut syarat-syarat perlindungan hak paten yang terlalu tinggi untuk diikuti oleh agen-agen pengembangan ilmu pengetahuan di negara-negara sedang berkembang. Sebagai konsekuensi logis dari persyaratan yang demikian, maka regulasi GATT/WTO tentang hak paten telah menyebabkan terjadinya paling sedikit akibat-akibat berikut yang sangat merugikan masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga:

- (a) pengecualian atau pengabaian masyarakat miskin dari akses terhadap barang-barang pemenuhan kebutuhan dasar, seperti obat-obatan, bibit tanaman, dan pendidikan;
- (b) memperkuat kesenjangan teknologi antara negara-negara industri maju dengan negara-negara sedang berkembang;
- (c) mempertajam kesenjangan pasar hasil-hasil penelitian dan pengembangan (R&D) ke arah barang-barang bagi konsumen-konsumen yang kaya daripada barang-barang kebutuhan dasar bagi orang-orang miskin;
- (d) memperburuk kesenjangan yang sama melalui konsentrasi kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) obat-obatan yang lebih menguntungkan bagi penyembuhan penyakit-penyakit degeneratif daripada penyakit-penyakit menular yang lebih banyak menimpa penduduk miskin;
- (e) membatasi kemampuan negara-negara miskin untuk melakukan inovasi-inovasi dan untuk berpartisipasi dalam pasar global; dan
- (f) mendorong terjadinya perampokan (*piracy*) sumberdaya-sumberdaya biologis dan pengetahuan tradisional petani-petani dan masyarakat lokal di negara-negara sedang berkembang.

Meskipun konstelasi kekuasaan global yang ada saat ini tidak memungkinkan Universitas Gadjah Mada, seperti halnya dengan banyak universitas di negara-negara Dunia Ketiga, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kuat untuk menggoyahkan arsitektur kekuasaan global di bawah monopoli GATT/WTO, namun dalam perspektif jangka panjang melalui pengembangan forum dan jaringan kerjasama regional dan internasional memiliki ruang yang cukup lebar untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang berarti. Keberhasilan Forum Sosial Dunia (*World Social Forum*)

menggagalkan pertemuan WTO di Seattle, USA (Madeley, 2002) yang diagendakan untuk memperketat regulasi perdagangan bahan pangan, memberikan bukti yang cukup otentik. Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia yang beranggotakan 2300 perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah menginisiasi kerjasama antar universitas (di tingkat nasional, regional dan internasional) untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kembali rencana WTO untuk memasukkan “pengetahuan” sebagai salah satu kategori “komoditi” ke dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang akan ditandatangani pada bulan Mei tahun 2005. Bila langkah tersebut dilaksanakan dalam sinergi yang kokoh dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh berbagai konsorsium universitas-universitas di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropah, India, dan Jaringan Universitas ASEAN, keberhasilan kebijakan yang dimaksud dapat diharapkan akan dapat mengikuti keberhasilan Forum Sosial Dunia dalam bidang pertanian.

Yang diperlukan adalah konsistensi perjuangan bersama kekuatan-kekuatan internasional yang progresif untuk membangun sinergi kebijakan-kebijakan mereka bagi reformasi tata pemerintahan global yang lebih pluralistis, lebih demokratis dan lebih adil. Dalam hubungan itu saran Mochtar Mas’oed yang disampaikan pada “*Seminar Revitalisasi Nilai-Nilai Luhur Universitas Gadjah Mada*”, menurut hemat saya perlu kita perhatikan. Meminjam ungkapan Sutan Takdir Alisjahbana, Mohammad Hatta, dan para ahli Hubungan Internasional, ia menyarankan agar perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan di atas landasan semangat atau strategi “Layar Berkembang”, “Mendayung Diantara Dua Karang”, dan “*Prudential Diplomacy*”, serta keberanian untuk melakukan banyak eksperimentasi.

Dewasa ini UGM sebagai Universitas Perjuangan, Universitas Kerakyatan serta nama-nama lain yang berkaitan dengan jati dirinya, ternyata belum terlalu berhasil melaksanakan amanat pemerintah maupun meneladani para pendirinya mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai dasar bangsa. Upaya-upaya sistematis untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar tersebut oleh segenap warga UGM dan pengamalannya dalam pelaksanaan misi Tridharma harus terus diupayakan. Lunturnya jati diri UGM

dalam kiprahnya dalam pelaksanaan dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagian disebabkan karena warga UGM khususnya, dan warga akademik Indonesia umumnya, tanpa sadar selalu “mengekor” perkembangan ilmu-ilmu yang berasal dari negara Barat. Erosi jati diri UGM menjadi bertambah cepat akibat pelaksanaan spesialisasi ilmu yang terlalu awal dan terlalu jauh. Kita mungkin dapat menarik pelajaran dari percakapan Prof. Sardjito dengan seorang tamunya dari Amerika Prof. Thayer mengenai bahaya spesialisasi ilmu yang berlebihan:

In your country, as well as in mine, it is being realized that too strong a trend toward specialization may be a dangerous thing for society. It is to be noted that an educational program devoted almost exclusively to specialization is likely to have the effect of separating people from people, not of bringing them together (dalam Mubyarto, 2004:160).

Agar UGM tidak terpeleceh kembali pada jebakan overspesialisasi ilmu, ia harus berani menerapkan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian akan dapat diperoleh manfaat sinergis yang lebih besar, bukan saja untuk ilmuwan dan praktisi, tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa. Untuk memfasilitasi tercapainya manfaat sinergis tersebut, proses pembelajaran harus berubah, dari metode konvensional “*banking education*” menjadi metode “*problem-posing education*” yang lebih merangsang kreativitas mahasiswa. Pada metode pertama dosen hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswa hanya pasif mendengar. Melalui metode kedua mahasiswa dilatih untuk selalu berhadapan dengan masalah nyata yang dicoba dipecahkan bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa.

Revitalisasi jati diri UGM yang merupakan totalitas dari nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan bangsa, dan keadilan sosial, merupakan momentum historis yang penting bagi UGM pada usianya yang ke-55 tahun. Dalam kondisi bangsa Indonesia sedang dilanda berbagai krisis yang nyaris menenggelamkan jati diri bangsa, UGM harus berdiri di garis depan memelopori upaya penyusunan pemikiran-pemikiran keilmuan yang dilandasi oleh nilai-

nilai yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. “Pemikiran Bulaksumur” dalam semua disiplin ilmu dan dalam semua bidang yang menyentuh kehidupan rakyat adalah langkah konkret kita untuk menempuh jalan lain yang tidak semata-mata merupakan foto-kopi dari pemikiran negara maju dan dengan memperhatikan keadaan dunia serta prediksi masa depan. Hanya dengan keberanian untuk memerdekakan diri dari pasungan pemikiran bahwa ilmu pengetahuan adalah universal dan *value free*, kita seluruh warga UGM akan mampu mengemban amanat dan memenuhi harapan para pendiri agar lembaga ini selalu menjadi sumber inspirasi bagi rakyat sebagaimana disampaikan oleh Presiden Soekarno pada upacara peresmian Gedung Pantjadharma yang lebih dikenal sebagai Gedung Pusat UGM.

Saya sependapat dengan Profesor Mubyarto bahwa penempatan kata ‘kemerdekaan’ sampai 7 kali pada Pembukaan UUD 1945 bukanlah tanpa makna, tetapi ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia di atas segalanya amat menghargai kemerdekaan dalam segala bidang, termasuk kemerdekaan berfikir. Marilah kita hayati betul semangat kemerdekaan tersebut, kita merdekakan pemikiran-pemikiran kita dari pasungan sindrom ‘*the very value of secularity*’ dan ‘*barbaric specialization*’ agar kita, warga UGM, mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran keilmuan yang cemerlang yang dijiwai oleh nilai-nilai perjuangan yang diamanatkan oleh para pendiri perguruan tinggi kebanggaan bangsa Indonesia.

Demikianlah pokok-pokok pemikiran Universitas Gadjah Mada yang telah dikembangkan oleh para pemukanya sejak perguruan tinggi ini didirikan. Dalam perjalanan selama 55 tahun, pemikiran-pemikiran yang dijiwai oleh nilai-nilai dasar bangsa tersebut pernah mencuat tinggi seperti disampaikan dalam pidato, tulisan dan perbuatan nyata para pimpinan dan warga terhormat Universitas Gadjah Mada. Pernah, hampir selama 40 tahun, nilai-nilai dasar bangsa tersebut tenggelam, tidak lagi menjiwai pemikiran dan perbuatan para warga kita. Sekarang, pada hari kelahirannya yang ke-55, perlu kita teguhkan kembali pandangan teleologis Universitas Gadjah Mada untuk menjadikan nilai-nilai dasar bangsa sebagai jiwa bagi pemikiran dan tindakan kita. Hanya dengan demikian kita warga Universitas Gadjah Mada akan mampu menjalankan misi yang diamanatkan oleh para pendiri yaitu menjadi perguruan tinggi nasional terunggul untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa dan menjadi sumber inspirasi bagi rakyat. Itulah jati diri Universitas Gadjah Mada.

DAFTAR PUSTAKA

Arasteh, A. R. 1966. *Teaching Through Research*, Leiden: E.J. Brill.

- Bessis, Sophie. 2003. *Western Supremacy: The Triumph of an Idea?*, London & New York: Zed Books.
- Bowles, Samuel and Herbert Gintis. 1976. *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*, New York: Basic Books, Inc., Publishers.
- Daly, Herman E. and John B. Cobb, Jr. 1989. *For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Future*. Boston: Beacon Press.
- De Groof, Jan, Gracienne Lowwers and Germain Dondelinger. 2004. *Globalization and Competition in Education*. Amsterdam: Wolf Legal Publishers.
- Etzkowitz, Henry and Ronald M. Glassman. 1991. *The Renaissance of Sociological Theory: Classical and Contemporary*, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Freire, Paulo. 1986. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Praeger.
- Gelinas, Jacques B. 2003. *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization*, London & New York: Zed Books.
- Hatta, Mohammad. 1989. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Heidegger, Martin. 1977. "Modern Science, Methaphysics, and Mathematics", dalam Krell, David F. *Martin Heidegger Basic Writings: From Being and Time (1927) to The Task of Thinking (1964)*, London and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Kline, Stephen J., 1995, *Conceptual Foundation for Multidisciplinary Thinking*, New York, NY: Zed Books.
- Kymlycka, Will. 1999. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, Oxford: Clarendon Press.
- Madeley, John, 2001, *Hungry for Trade: How the Poor Pay for Free Trade*. New York, NY: Zed Books.
- M. Sardjito. 1956. "Pidato Pada Pemberian Gelar Honoris Causa Oleh Universitas Gadjah Mada Kepada Ki Hadjar Dewantara", Universitas Gadjah Mada.
- _____. 1960. "Pidato Pembukaan Rapat Senat Terbuka pada Peringatan Dies Natalis XI", Universitas Gadjah Mada.
- Mubyarto. 2004. *Pancasila Dasar Negara, UGM dan Jati Diri Bangsa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nelson, Jack L., Kenneth Carlson, and Stuart B. Palonsky. 1996.

- Critical Issues in Education: A Dialectic Approach*, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Noam, Eli M. 1995. "Electronics and the Dim Future of the University", dalam *Science*, Vol. 270, pp 247-249.
- O'neil, William F. 2001. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1981. *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies*, Santa Monica, California: Goodyear Publishing Company, Inc.
- Robbins, Peter. 2003. *Stolen Fruit: The Tropical Commodities Disaster*, London & New York: Zed Books.
- Robertson, Robbie. 2003. *The Three Waves of Globalization: A History of a Developing Global Consciousness*, London dan New York: Zed Books
- Smiers, Joost. 2003. *Arts under Pressure: Protecting Cultural Diversity in Age of Globalization*. London and New York, NY: ZedBooks.
- Tehrani, Majid. 1999. *Global Communication and World Politics: Domination, Development, and Discourse*, Linne Rienner Publishers.
- _____. 1996. "The End of University", reproduced with permission by Taylor and Francis, Inc, <http://www.routledge-ny.com>.
- Webster, Frank, 2002, *Theories of the Information Society*. New York, NY: Routledge.